

Kapolri Minta Pemda DKI Siapkan Wilayah Isolasi Terpadu Antisipasi Lonjakan Pasien Wisma Atlet



Realitakyat.com - Kapolri Jend Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyiapkan 31 wilayah isolasi terpadu dalam rangka mengantisipasi lonjakan keterisian kamar isolasi di Rumah Sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran.

"Kami imbau pemda, kepada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu," ujar Kapolri dalam keterangan pers dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Sigit mengatakan, DKI Jakarta merupakan satu wilayah dari sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Selain Jakarta, ada pula wilayah lain seperti Kudus, Bangkalan, dan juga Riau.

"Untuk wilayah DKI diketahui angkanya mencapai 4.800 kasus harian," ujar Sigit menambahkan. Karenanya, Sigit mengatakan, penguatan 3T akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet. Bahkan, mantan Kapolda Banten itu meminta Pemprov DKI untuk segera merealisasikan 31 wilayah yang digunakan untuk isolasi mandiri terpadu.

"Termasuk di wilayah Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tempat lain termasuk apabila diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri, karena tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan tracing dan testing," tambah Sigit.

Sigit berharap, upaya-upaya tersebut juga diterapkan di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 (Riau, Bangkalan, dan Kudus).

"Harapannya, dengan berbagai model yang dilaksanakan di Riau, Kudus, Bangkalan, dan DKI maka model ini pun diharapkan bisa memberikan hasil maksimal dan segera bisa diturunkan laju pertumbuhan angka COVID-19," ujar Sigit lebih lanjut.

Selain itu, Kapolri juga meminta agar penegakan aturan di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM Mikro diperkuat lagi. Jam operasional dibatasi, sehingga yang melanggar diberikan sanksi tegas.

"Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional dilakukan penutupan termasuk tentunya yang melanggar diterapkan sanksi sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan," pungkas Sigit. (Ilm)